

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, W. 2016. "Pergeseran Beban Pajak" <https://id.scribd.com/document/324904562/Pergeseran-Beban-Pajak>. [diakses pada 29 April 2019].
- Agung, M. 2011. *Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aizenman, J., dan Y. Jinjark. 2005. "The Collection Efficiency Of The Value Added Tax : Theory And International Evidence". *National Bureau Working Paper*, Vol. 15, No., hlm: 571-610.
- Alika, R. 2019. "Jumlah Pemohon Restitusi Pajak Melonjak 264% Pada 2018" <https://katadata.co.id/berita/2019/02/20/jumlah-pemohon-restitusi-pajak-melonjak-264-pada-2018>. [diakses pada 21 Februari 2019].
- Andriani, P. J. A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anonim. 2019. *Nota Keuangan dan RAPBN 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- "Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019". 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/10377/nota-keuangan-dan-rapbn-2019.pdf>. [diakses pada 22 April 2019].
- Cooper, D. R., dan P. S. Schindler. 2003. *Business Research Methods, International Edition*. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Djuanda, G., dan I. Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gahara, A. S., dan D. Sukmasari. 2016. "Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandar Lampung)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 21, No. 1,
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi, R. Mansury, R. Surahmat, N. Mulyodiwarno, A. P. Kristanto, J. Hutagaol, I. Santoso, A. P. Bhakti, B. Wiyanto, G. Pribadi, Christine, W. Widodo, T. Budiharto, dan H. Setiawan. 2008. *Inside Tax Kepastian Hukum dalam Pajak Pertambahan Nilai*. Juli 2008.

Handayani, R. 2016. "Analisis Restitusi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Kantor Wilayah Jawa Barat 1 Periode 2010-2015)", Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Indonesia, R. 2009. "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ". Jakarta.

"Jabar Jantung Industri Nasional". 2019.
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9664/Jabar-Jantung-Industri-Nasional.html>. [diakses pada.

Jusmani, dan R. Qurniawan. 2016. "Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat". *Jurnal Wahana Media Ekonomika*, Vol. 13, No. 3, hlm: 130-142.

Kagan, J. 2018. "Tax Incidence"
https://www.investopedia.com/terms/t/tax_incidence.asp. [diakses pada 14 April 2019].

Karina, M., dan S. Khairani. 2013. "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat"
<http://eprints.mdp.ac.id/724/1/JURNAL%20Meta%20karina%202009210047.pdf>. [diakses pada 1 July 2019].

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;. 2003.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2000.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan. 2000.

Lubis, F. K. 2016. "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota". *Wahana Inovasi*, Vol. 5, No. 2, hlm: 466-476.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Masruroh, I. 2016. "Pengaruh Jumlah Pegusaha Kena Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2010 - 2014)", Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Merliana, A. 2016. "Pengaruh Withholding System Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2011-2015)". *Skripsi*, Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Metekohy, S. 2013. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pergeseran Pajak dan Beban Lebih (Studi Pada Industri Garmen dan Konsumen Garmen di Jawa Barat)". *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 17, No. 2, hlm: 107-120.
- Mulki, H. 2016. "Pengaruh Restitusi Ppn Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2011-2015)", Akuntansi, Univeristas Komputer Indonesia, Bandung.
- Nasrulloh, N. 2015. "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)", Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Ningrum, N. M., N. Atikasari, R. Wulandari, dan S. Baresi. 2016. "Analisis Pajak" https://www.academia.edu/32703269/Keuangan_Negara. [diakses pada 26 Mei 2019 2019].
- Nuraeni, D. 2011. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN".
- Nurrokhman, A. 2014. "Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari)". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Panjaitan, J. Y., dan H. Fitri. 2018. *Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Periode 2013-2018 Dan Target Dalam RAPBN 2019* edited by P. K. A. B. K. D. RI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan*. 2005.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006*. 2006.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2018*. 2018.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2018. 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. 2000.

Praciastuti, N. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II)", *Ekonomi Pembangunan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Puspitasehati, M. A. 2013. "Analisis Pajak" https://www.academia.edu/3637017/ANALISIS_PAJAK. [diakses pada 29 April 2019].

Renata, A. H., K. Hidayat, dan B. Kaniskha. 2016. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah Djp Jawa Timur I)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9, No. 1, hlm.

Resmi, S. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, S. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Santoso, U. 1991. "Penggesean Beban Akhir Pajak-Pajak Penjualan : Teori dan Prakteknya di Indonesia" http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/866/KTI_URIP_penggesean_beban_akhir-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y. [diakses pada 6 April 2019].

Setyawan, A. 2012. "Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010". *Tugas Akhir*, Akuntansi Diploma III, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Sinambela, T., dan S. Rahmawati. 2019. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, hlm.

Singarimbun, M., dan S. Effendi. 2008. *Metode Penelitian dan Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai* Jakarta: Rajawali Pers.

Supit, W. M., D. P. E. Saerang, dan H. Sabijono. 2014. "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *EMBA*, Vol. 2, No. 3, hlm: 159-166.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.5/1993 tentang langkah-langkah pengamanan pemberian restitusi PPN. 1993.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003.

Undang-Undang No. 8 tahun 1983. 1983.

Undang-Undang No. 11 tahun 1994. 1994.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 2009.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusadi, I. 2018. "Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota", Akuntansi, Universitas Medan Area, Medan.